p-ISSN 2088-1045
e-ISSN 2714-5476

The Way
Jurnal Teologi dan Kependidikan

Volume 9 | Nomor 2 | Oktober 2023

PERAN KEADILAN DAN AGAMA BAGI MASYARAKAT SOSIAL DI INDONESIA

Lusyana Y. Winata[1], Eddy Danukusumah[2], Rikardo P. Sianipar[3]
[1)] Mahasiswa Program Studi Doktoral STT IKAT
[2)] Mahasiswa Program Studi Doktoral STT IKAT
[3)] *STT Bethel The Way*
[*)] *lucyoey25@gmail.com*
[*)] eddydanukusumah@gmail.com
[*)] *rikardo.sianipar@sttbethelltheway.ac.id*

Riwayat Artikel
Diterima Redaksi:
19 September 2023
Proses Revisi:
25 September 2023
Diterbitkan:
30 Oktober 2023

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepentingan kegiatan dan aktifitas dalam agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional, disamping meningkatkan kesadaran dan moralitas akan pentingnya hidup beragama dalam memunculkan keseimbangan antara nilai moral kepada Tuhan dan juga kasih terhadap sesama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibuatlah penelitan kualitatif dengan pendekatan literatur yang bertujuan untuk mengetahui peran agama dan keadilan dalam masyarakat sosial. Hubungan antara peran agama dan pemerintah harus dititikberatkan pada kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan saat ini hingga masa depan. Keadilan sosial diharapkan muncul dari kalangan masyarakat agar tercipta masyarakat madani yang menjaga kestabilan nilai ekononi negara, sosial masyarakat dan kebudayaan. Agama sebagai penunjang program pemerintah yang diberdayakan sebagai salah satu media untuk mencapai keadilan sosial secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peran Agama, Keadilan sosial, Sosial Masyarakat.

Abstract
This research aims to increase the importance of activities in religion. Hope that this research can make up an active role in realizing national development, to increase the awareness and morality regarding the importance of religious life in creating a balance between moral values towards God and love towards others. To answer this question, qualitative research was carried out using a literature approach which aims to determine the role of religion and justice in social society. The relationship between the role of religion and government must be focused on the interests of society based on current and future needs. Social justice is expected to emerge from within society in order to create a civil society that maintains the stability of the country's economic, social and cultural values.Religion supports government programs that is used to achieve overall social justice.

Keywords: The Role of Religion, Social Justice, Social Society.

Pendahuluan

Pancasila merupakan idiologi negara Indonesia serta pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ciri utama dari adanya negara Indonesia ini dalam menciptakan suatu kehidupan yang beragam dengan berbagai macam budaya. Pancasila hadir sebagai alat pandangan hidup masyarakat Indonesia agar dari berbagai macam budaya, ras, suku dan agama dapat menciptakan suatu persatuan, keutuhan dan perdamaian dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup berdasarkan Pancasila terus menerus digali dan dikaji dalam kehidupan masyarakat agar setiap kebutuhan dan kepentingan manusia Indonesia dapat terpenuhi serta dapat direalisasikan demi terwujudnya sebuah perdamaian. [1] Kepentingan dan kebutuhan setiap insan Pancasila mengupayakan supaya dalam setiap budaya di Indonesia dapat mencukupi kebutuhan akan rasa aman, rasa adil, solidaritas, toleransi, kesepakatan, dan keadilan sosial yang dapat dirasakan secara menyeluruh bagi warga Indonesia. Tercapainya sebuah persatuan dan kesatuan bangsa harus memperhatikan aspek nilai-nilai pancasila yang salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kompleksitas dalam perkara keadilan sosial masyarakat Indonesia mengundang banyak pertanyaan tentang sikap penyelenggara, dalam hal ini negara, dalam mengambil kebijakan terkait rasa keadilan di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya dengan adanya program-program yang dijalankan, banyak masyarakat menilai bahwa pembangunan nasional itu hanya untuk kawasan tertentu saja seperti pulau Jawa. Padahal secara menyeluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus merata dari propinsi Aceh hingga Papua. Pandangan masyarakat tentang pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan data dari PUPR tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur nasional berupa bendungan, jalan, jembatan, cipta karya, dan lain-lain telah menunjukkan angka yang baik dalam perkembangannya serta telah melaksanakan program-program secara merata di seluruh Indonesia.[2]

Upaya penyelenggara negara dalam mencapai keadilan sosial menunjukkan bahwa dalam lingkup masyarakat dengan budaya masing-masing dapat saling bergotong-royong membangun negeri, sehingga kesenjangan sosial dalam masyarakat tidak akan mempengaruhi hubungan baik antar daerah. Prinsip keadilan dalam masyarakat adalah supaya masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang sama rata untuk tercapainya sebuah negara yang memiliki nilai persatuan yang kuat. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, harus

[1] Christian Siregar, "View of Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," 2014, https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/2988/2379.

[2] Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderak Kementrian PUPR, "Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021," Kementrian PUPR Indonesia, 2021, https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021_Final.pdf.

memastikan bahwa setiap program dalam pembangunan negara mampu mendongkrak nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerataan dengan sistem otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan standard kebutuhan masyarakat yaitu rasa aman, adil, solidaritas, toleransi, kesepakatan dan keadilan sosial yang dapat dirasakan secara menyeluruh bagi warga Indonesia.

Menurut Darmodihardjo, 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[3]

Kenyataan bahwa program-program pemerintah banyak menuai pendapat dalam benak sebagian masyarakat bahwa kesejahteraan dan keadilan masyarakat belum mencapai target secara tepat. Seperti aksi demo mahasiswa pada tanggal 21 April 2022 menuntut agar pemerintah melakukan 1) Redistribusi kekayaan nasional dengan memberikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat, 2) menurunkan harga BBM, minyak goreng, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), listrik, pupuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tol. 3) Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.[4] Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah melaksanakan program demi tercapainya keadilan dalam masyarakat sosial. Perlu adanya upaya baik dari kalangan masyarakat untuk mewujudkan dan mendukung program nasional agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Salah satu yang mampu untuk memberikan arahan secara masif adalah peranan agama di Indonesia.

Agama dan pemerintah harus bersama-sama mewujudkan kolaborasi yang baik sehingga pencapaian program nasional bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemahaman secara moral dari institusi agama dapat membuat seseorang menyadari bahwa pemerintah adalah wujud dari perwakilan pemerintahan Tuhan yang ada di dunia. Pemahaman dan pengertian dalam konteks pembangunan nasional mengarahkan pemikiran untuk

[3] Siregar, "View of Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia."

[4] "Demo 21 April Hari Ini Di DPR, Berikut Tuntutan Mahasiswa Dan Buruh Halaman All - Kompas.Com," accessed October 21, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/09140231/demo-21-april-hari-ini-di-dpr-berikut-tuntutan-mahasiswa-dan-buruh?page=all.

melihat masa depan yang baik. Indonesia dikenal karena masyarakatnya yang taat menjalankan perintah agama, maka dari itu para pemuka agama dapat menjadi ujung tombak sosialisasi tentang terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Agama merupakan salah satu acuan kehidupan dalam budaya masyarakat Timur yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan yang kuat dengan nilai dan norma-norma yang berlaku serta dibentuk dalam bentuk aturan dalam agama. Setiap agama tentu tidak mengajarkan hal yang buruk namun senantiasa memberikan petunjuk untuk yang lebih baik sesuai dengan keyakinan yang diajarkan dari agama yang dianutnya. Peran agama mengharuskan setiap manusia untuk berperilaku baik dalam urusan sosial, ekonomi, politik bahkan segi keadilan dalam masyarakat majemuk. Jadi agama tidak hanya menjadi media antara Tuhan dan hamba-Nya, tetapi peranan agama juga sebagai penyeimbang dan pembentukan karakter berdasarkan nilai spiritual sehingga dengan agama, manusia diharapkan dapat mengaplikasikan setiap ajaran yang luhur dalam agamanya.[5] Manusia pada dasarnya bersifat religius, makhluk beragama, dan itu tercermin dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Menurut Durkheim agama merupakan sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, kepercayaan-kepercayaan dan peribadatan-peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke dalam suatu komunitas moral yang disebut persekutuan. Menurutnya peribadatan, perasaan takut dan hikmat merupakan sifat-sifat pokok agama, tanpa mempermasalahkan sasaran peribadatannya. [6] Baginya, agama menjawab permasalahan, persoalan dan kebutuhan hidup pribadi atau individu tertentu.[7] Berdasarkan pemikiran ini maka kehidupan masyarakat dalam beragama dapat mewujudkan suatu perdamaian bagi bangsa dan negara. Dari sisi sosiologi agama, ada dua definisi agama menurut Durkeheim yaitu definisi fungsional dan definisi substantif agama. Durkheim lebih menekankan definisi fungsional agama (the functional definiton of religion) yaitu bagaimana peran agama di dalam masyarakat (the matrix of meaning). Definsi fungsional agama menempatkan agama pada inti masyarakat, sesungguhnya agama adalah bagian yang bersifat konstitutif terhadap masryarakat. Pengaruh Durkheim meluas di Amerika Serikat. Definisi agama sebagai fungsi substantif menyebabkan karakteristik esensial agama berhubungan dengan dunia yang tidak tampak, sehingga menyebabkan agama dilihat sebagai sesuatu yang primitif, ketinggalan zaman dan tidak dapat dipercaya, belum dicerahkan dan aneh. Definisi substantif banyak dianut oleh

[5] Wildan Solihin et al., "Peran Ajaran Islam Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi A . Pendahuluan Korupsi Merupakan Penyakit Sosial Yang Kerap Terjadi Dan Seringkali Menjadi Awal Runtuhnya Peradaban Yang Maju 1 Bahkan Dunia Pendidikan Pun Tidak Luput Dari Kejahatan Yang Luar Bi" 2, no. 2 (2021): 143–54.

[6] Betty R Scharf, *Kajian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 30–31.

[7] Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, ed. Edi AH Iyubenu and Arif Fahrudin, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 554.

kaum sosiolog agama yang juga mengakui definisi fungsional agama, tetapi menurut mereka karakteristik esesial agama berhubungan dengan dunia yang tidak tampak (invisible world*).* [8] Menurut mereka, agama dipahami sebagai pertemuan suku bangsa dengan ilah-ilah, roh-roh dan dunia supranatural. Sehingga agama dianggap primitif, terbelakang, aneh bahkan ketinggalan zaman. Definisi secara substantif mengakibatkan banyak orang meninggalkan agama dan lebih percaya kepada hal-hal logika yang dapat dipikirkan dan lebih dapat diterima. Durkheim juga berpendapat ada hubungan antara agama dan masyarakat.

Yinger, seorang sosiologi kontemporer lebih menyukai definisi yang bersifat fungsional dibandingkan dengan substantif. Definisi agama menurutnya adalah sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Agama merupakan keengganan untuk menyerah pada kematian, menyerah dalam menghadapi frustasi dan untuk menumbuhkan rasa permusuhan terhadap penghancuran ikatan-ikatan manusia. [9] Max Weber, seorang sosiolog agama dengan bukunya yang terkenal *The Prostestant Ethic and the Spirit of Capitalisme* yang terbit tahun 1904, mempunyai latar belakang sebagai sejarawan ekonomi dan ahli sosiologi. Sesuai dengan bidangnya ekonomi, ia banyak meneliti hubungan antara agama dan kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat barat di abad 16. Dalam bukunya ia membahas masalah hubungan antara berbagai kepercayaan keagamaan dan etika praktis. Lingkup kajiannya mencakup seluruh hubungan yang mungkin terjadi antar berbagai corak masyarakat dan agama yang menghasilkan kajian komparatif terhadap agama-agama dan berbagai struktur sosial yang ada.[10]

Berdasarkan polemik serta pengertian peranan agama secara teoritis, bagaimana peranan agama terhadap keadilan dalam masyarakat sosial? Bagaimana peranan agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat? Apakah hubungan antara peranan agama dan pemerintah harus menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan saat ini hingga kebutuhan masa depan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian literatur, yaitu suatu kajian pustaka yang mendukung suatu permasalahan tertentu dan dikaji secara mendalam. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang relevan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai

[8] A A Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 5.
[9] Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*.
[10] Scharf.

literatur yang berkaitan dengan agama dan keadilan sosial dalam masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui peranan agama dalam masyarakat sosial. Pengkajian mengenai peranan keadilan dalam masyarakat sosial juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari siklus penelitian.

Hasil Penelitian

Peran Keadilan dan Agama dalam Masyarakat

Pengertian peran (role*)* menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain demikian sebaliknya.[11] Ini berarti peran menunjuk kepada sebuah fungsi ataupun proses yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Peran Keadilan Bagi Masyarakat Sosial

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[12] Pemerataan dalam hal keadilan di Indonesia bukan berarti mendapatkan hal yang sama melainkan mempunyai hak hidup yang sama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak yang sama dalam masyarakat dapat menghindari kesenjangan sosial yang terlalu tinggi karena akan berdampak pada nilai ekonomi masyarakat, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, penyelenggara tatanan negara perlu memikirkan langkah-langkah praktis dalam membangun sumber daya yang terdapat pada lingkungan daerah agar hak yang didapatkan merupakan hak hidup yang sama rata. Pemerataan fasilitas umum dikaji secara berkala karena setiap kebutuhan dari masyarakat di daerah satu dengan yang lainnya akan terasa berbeda. Inilah bentuk keadilan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sosial yang adalah bagian dari sistem demokrasi masyarakat Indonesia yang menginginkan persamaan hak hidup atas bumi Indonesia.

Penerapan mengenai prinsip demokrasi adalah dengan terbentuknya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalan dan memaknai kehidupannya. Dalam masyarakat madani, rakyat diberi kebebasan untuk berkiprah sesuai dengan peradaban dan nilai yang tumbuh serta

[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 213.

[12] Dengan Mewujudkan, Umum, and Suhardin', "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum."

berkembang dalam masyarakat. [13] Penerapan seperti ini diharapkan agar masyarakat turut serta dalam membangun sistem keadilan sosial dalam masyarakat, karena mampu untuk menilai, memanfaatkan serta mengembangkan program pembangunan nasional pemerintah demi kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat madani mampu untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan sistem keadilan di Indonesia dengan nilai ekonomi negara, sosial, budaya berdasarkan prinsip moral yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan fasilitas umum di daerah-daerah terpencil diharapkan mampu untuk mendongkrak perekonomian daerah supaya setiap daerah memiliki pendapatan yang layak sesuai yang diatur oleh undang-undang. Kesadaran akan pentingnya fasilitas umum yang sesuai kebutuhan masyarakat daerah diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tonggak berdirinya ekonomi yang kuat dan kesejahteraan masyarakat dapat dijamin. Itulah hak hidup yang harusnya didapat oleh setiap warga negara di Indonesia. Keadilan tidak pernah memilih tempat dan waktu untuk ia memberi keadilan kepada manusia. Keadilan semestinya dilaksanakan terbebas dari ruang, waktu, dan keadaan. Ia dapat dilaksanakan setiap saat dan di setiap tempat. Dan perlu diingat, bahwa keadilan juga tidak hanya berhak dimiliki oleh manusia semata, tetapi juga oleh seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dari sikap adil kita kepada seluruh mahluk hidup inilah lahir keharmonisan yang menuntun kita pada kerahayuan. Tri Hita Karana adalah formula dari bentuk keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam serta lingkungannya. Keharmonisan ini juga mengandung makna bahwa keadilan telah terimplementasi di dalamnya.[14]

Keadilan menurut ajaran Budha, yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah watak mereka yang dibentuk oleh tingkah laku sehari-hari. Sedangkan etika sosial Budha menekankan bahwa setiap orang harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan sosialnya, yang ditentukan oleh hubungannya dengan warga masyarakat lain berdasarkan prinsip-prinsip moral. Dengan demikian orang akan mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan dalam masyarakat. Sebaliknya orang yang tidak menjalankan kewajiban, kedudukan dan tanggung jawabnya dalam masyarakat tidak pantas diakui atau dihargai kedudukan sosialnya. Dengan keadilan, umat Budha Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama. Dalam rangka menciptakan keadilan sosial, perlu dikembangkan

[13] Nur Hidayat Wahid, *Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007), 187.

[14] "Parisada Hindu Dharma Indonesia," accessed October 24, 2022, https://phdi.or.id/artikel.php?id=keadilan.

perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.[15]

Dalam perpektif agama Kristen, Alkitab banyak menuliskan hal-hal yang berkenaan dengan keadilan. Kata adil dan termasuk keluarga kata (adil, mengadili, teradil, teradili, pengadil, pengadilan, keadilan, berkeadilan) tercatat sebanyak 82 kali dari 80 ayat, yang terbagi di dalam Perjanjian Lama sebanyak 58 dan 56 ayat dan Perjanjian Baru sebanyak 24 kali dari 24 ayat.[16] Dari jumlah kata yang ada di dalam Alkitab dapat dilihat bahwa kata tersebut merupakan sesuatu hal yang penting. Dalam Ulangan 16:19-20 *Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu*. Judul perikop tersebut adalah Pengadilan yang adil, yaitu saat Allah memberikan perintah kepada hakim dalam suku Israel untuk menegakkan keadilan dan hidup dalam kebenaran, dan ada *reward* yang diberikan jika mengejar keadilan, yaitu dapat hidup dan memiliki negeri yang diberikan Allah kepada mereka. *Reward* yang didapatkan dari mengejar keadilan berkaitan dengan kehidupan dan ketentraman, sedangkan perilaku tidak adil akan membawa kematian. Dari fungsinya yang transformatif, hal ini juga dapat dilihat dari Mazmur 82:3, yang merupakan perintah kepada para hakim untuk membela orang sengsara dan berkekurangan. Dalam hal ini mereka harus menjadi pelindung bagi orang lemah dan menyelematkan mereka dari penindas. Dari sisi keadilan, peran hakim sangatlah besar bagi orang-orang yang menderita ketidakadilan untuk membebaskan dari ketidakadilan tersebut dan merasakan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan ajaran agama Islam, istilah keadilan identik dengan kese suaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk Al-Qur'an membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian – apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan – harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yang menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi.[17]

[15] "BAB III KONSEP KEADILAN DALAM BUDDHA - PDF Free Download," accessed October 24, 2022, https://docplayer.info/72511044-Bab-iii-konsep-keadilan-dalam-buddha.html.

[16] "Adil - Studi Kata - Alkitab SABDA," n.d.

[17] Tamyiez Dery, "Tamyiez Dery, Drs., M.Ag., Adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337," n.d., 337–51.

Keadilan menurut ajaran agama Hindu bagaikan sinar matahari yang tak pernah memilih tempat untuk bersinar. Semua disinari tidak terkecuali. Bagaikan Yama yang tidak pilih kasih untuk memberikan keadilan. Dalam epos besar Mahabharata, kita juga banyak menemukan pelajaran tentang bagaimana keadilan harus dijalankan. Dewi Kunti adalaha sosok seorang ibu yang bijak, karena mampu berlaku adil kepada semua anak-anaknya, termasuk terhadap anak tirinya, Nakula dan Sahadewa (Putra Dewi Madri). Dewi Drupadi juga adalah figur istri yang adil kepada kelima suaminya meskipun sungguh-sungguh ia telah mencintai Arjuna.

Dalam perpektif agama Kristen, Alkitab banyak menuliskan hal-hal yang berkenaan dengan keadilan. Kata adil dan termasuk keluarga kata (adil, mengadili, teradil, teradili, pengadil, pengadilan, keadilan, berkeadilan) tercatat sebanyak 82 kali dari 80 ayat, yang terbagi di dalam Perjanjian Lama sebanyak 58 dan 56 ayat dan Perjanjian Baru sebanyak 24 kali dari 24 ayat.[18] Dari jumlah kata yang ada di dalam Alkitab dapat dilihat bahwa kata tersebut merupakan sesuatu hal yang penting. Dalam Ulangan 16:19-20 *Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu*. Judul perikop tersebut adalah Pengadilan yang adil, yaitu saat Allah memberikan perintah kepada hakim dalam suku Israel untuk menegakkan keadilan dan hidup dalam kebenaran, dan ada *reward* yang diberikan jika mengejar keadilan, yaitu dapat hidup dan memiliki negeri yang diberikan Allah kepada mereka. *Reward* yang didapatkan dari mengejar keadilan berkaitan dengan kehidupan dan ketentraman, sedangkan perilaku tidak adil akan membawa kematian. Dari fungsinya yang transformatif, hal ini juga dapat dilihat dari Mazmur 82:3, yang merupakan perintah kepada para hakim untuk membela orang sengsara dan berkekurangan. Dalam hal ini mereka harus menjadi pelindung bagi orang lemah dan menyelematkan mereka dari penindas. Dari sisi keadilan, peran hakim sangatlah besar bagi orang-orang yang menderita ketidakadilan untuk membebaskan dari ketidakadilan tersebut dan merasakan keadilan itu sendiri.

Berdasarkan ajaran agama Islam, istilah keadilan identik dengan kesesuaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk Al-Qur'an membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti pembedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian – apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan – harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini

[18] "Adil - Studi Kata - Alkitab SABDA," n.d.

menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, yang menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan ilahi.[19] Keadilan menurut ajaran agama Hindu bagaikan sinar matahari yang tak pernah memilih tempat untuk bersinar. Semua disinari tidak terkecuali. Bagaikan Yama yang tidak pilih kasih untuk memberikan keadilan. Dalam epos besar Mahabharata, kita juga banyak menemukan pelajaran tentang bagaimana keadilan harus dijalankan. Dewi Kunti adalaha sosok seorang ibu yang bijak, karena mampu berlaku adil kepada semua anak-anaknya, termasuk terhadap anak tirinya, Nakula dan Sahadewa (Putra Dewi Madri). Dewi Drupadi juga adalah figur istri yang adil kepada kelima suaminya meskipun sungguh-sungguh ia telah mencintai Arjuna.

Peranan keadilan yang diselenggarakan pemerintah harus memperhatikan setiap kebutuhan dasar manusia menurut kapasitasnya. Pembangunan nasional terutama di bidang pembangunan hukum dan ekonomi harus berorientasi kepada kesejahteraan umum. Hal tersebut harus dimulai dengan memahami dengan baik semangat pembangunan nasional itu yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 baik pembangunan di bidang hukum maupun pembangunan di bidang ekonomi.[20]

Peranan Agama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh moral juga agama. Agama di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur nilai-nilai moral dan juga etika kehidupan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Kehidupan dalam bermasyarakat di Indonesia yang beragam sangatlah dipengaruhi oleh kehidupan beragama. Hal ini disebabkan oleh karena agama dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi komunitasnya melalui ajaran-ajaran mereka. Beberapa agama mendorong pengikut ajarannya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam membantu orang-orang yang belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan untuk memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik.[21] Dalam agama Kristen diajarkan agar pengikut Kristus berbaur dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, tidak bersifat eksklusif, tetapi menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salah satunya adalah dengan memberikan diakonia. Diakonia bertujuan untuk mewujudkan manusia dan dunia baru. Diakonia tidak hanya menciptakan hubungan memberi

[19] Tamyiez Dery, "Tamyiez Dery, Adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337," n.d., 337–51.

[20] Kemiskinan Dengan Mewujudkan, Kesejahteraan Umum, and Yohanes Suhardin', "PERANAN NEGARA DAN HUKUM DALAM MEMBERANTAS KEMISKINAN DENGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 3 (September 3, 2012): 302–17, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/274.

[21] Goei Theodore and Hendy Soegiharto, "Peran Agama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pendahuluan" 4, no. 2 (2022): 267–80.

dan menerima, tetapi dalam rangka *Missio Dei.*[22] Secara khusus, diakonia adalah pelayanan gereja yang tidak terbatas hanya kepada orang miskin, namun mencakup semua orang yang bergumul dengan masalah kehidupan masyarakat. Jadi diakonia merupakan aspek dari pelayanan kesaksian gereja.[23] Diakonia sendiri terdiri dari 3, yaitu (1) Diakonia Karitatif, (2) Diakonia Reformatif dan (3) Diakonia Transformatif. Diakonia karitatif adalah model diakonia yang menitikberatkan pada tindakan amal, dilakukan dalam jangka pendek di mana bantuan diberikan secara langsung. Diakonia Reformatif lebih bersifat ke arah aspek pembangunan dengan pendekatan *Community Development* seperti pembangungan pusat kesehatan, penyuluhan, pembinaan masyarakat, usaha simpan pinjam dan lain-lain. Ilustrasi diakonia reformatif adalah seperti memberikan kail, dimana harus ada usaha dari yang menerima bantuan. Sedangkan Diakonia Transformatif adalah tindakan gereja melayani multi dimensional (roh, jiwa, tubuh) dan juga multi sektoral (ekonomi, politik, kultural, hukum dan agama).[24]

Peran agama dalam masyarakat adalah sebagai jangkar dalam kehidupan moral di masyarakat, yang mengatur kehidupan manusia dan menjadi pedoman bagi manusia untuk menentukan arah kehidupannya, dan agama bagaikan kompas moral bagi kehidupan manusia. Nottingham menyatakan fungsi agama secara empiris dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Sebagai faktor yang mengintregasikan (menyatukan) masyarakat. Melalui agama dapat tercipta suatu ikatan bersama di antara anggota masyarakat dalam kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Nilai-nilai yang mendasari sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok sosial keagamaan, sehingga persetujuan bersama dalam masyarakat dijamin oleh agama. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial.
2. Sebagai faktor yang mendisintregasikan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama di satu sisi dapat mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri sehingga apabila tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah-belah dan bahkan menghancurkan. Disamping itu agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan revolusioner.

[22] J.P Widyatmadja, *Yesus Dan Wong Cilik : Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 11.

[23] Otoritet Dach et al., *Pergumulan Di Sekitar Gereja Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 210.

[24] Dach et al., *Pergumulan Di Sekitar Gereja Dan Pendidikan*.

Berdasarkan hal tersebut, peran agama bagaikan pisau yang bermata dua yang saling bertolak belakang. Di satu sisi saling mempersatukan tetapi di sisi lain saling menghancurkan. Hal ini sangatlah rentan untuk dipermainkan, tergantung siapa dan kondisi apa serta untuk kepentingan siapa. Untuk itulah kerukunan agama perlu diterapkan dan dilestarikan di dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat bersatu. Karena melalui agama keadilan dan perdamaian dan diwujudukan. Hal ini sejalan dengan pendapat sosiolog Hendropuspito yang menuliskan fungsi agama dalam masyarakat antara lain:[25]

1. Fungsi Edukatif. Agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi bagi para penganutnya. Secara yuridis, ajaran agama mempunyai peran memberi perintah dan melarang, yang bertujuan untuk mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.
2. Fungsi Penyelamatan. Manusia selalu menginginkan dirinya selamat. Dengan agama, pengajaran mengenai keselamatan diberikan kepada penganutnya, yaitu bahwa keselamatan meliputi dua alam, dunia dan akhirat. Hal tersebut diberitakan melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.
3. Fungsi Pengawasan Sosial. Fungsi ini bersifatnya psikologis dan nonfisik, yang merupakan tekanan mental terhadap individu. Dari fungsi pengawasan sosial ini maka peran agama dapat dibedakan menjadi (1) meneguhkan kaidah atau norma susila yang dipandang baik dan sesuai bagi kehidupan masyarakat, (2) mengamankan dan melestarikan kaidah tersebut dari infiltrasi agama baru atau pengaruh umum dari negara, (3) agama dapat mengadakan inkulturasi pada nilai hukum adat setempat, dan (4) memberlakukan *reward and punishment* bagi anggota kelompok secara adil. Sehingga setiap individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan keinginan kelompok.
4. Fungsi Transformatif. Fungsi ini sesuai dengan karakter sejati dari agama itu sendiri, yaitu pembebasan dari keterbelengguan dan keterkungkungan, sekaligus menghendaki adanya dinamika sosial yang terus menerus. Fungsi inilah yang dapat mengharmonisasikan serta melestarikan keberadaan agama di tengah-tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Dengan berlakunya fungsi transformatif ini, agama akan selalu sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi tidak serta merta menghilangkan makna sejati agama yaitu tetap mempertahankan nilai-nilai spiritualitasnya.
5. Fungsi Pemupuk Persaudaraan. Fungsi ini secara sosiologis sangatlah relevan dengan keberadaan agama yang merepresentasikan sebagai institusi sosial. Dengan agama, manusia dari berbagai ras, suku bangsa dan

[25] M.Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 59–62.

budaya dapat dipersatukan dalam komuni persaudaraaan (brotherhood*)*, dimana mereka menemukan hakikat kemanusiaan sebagai makhluk sosial.

Melihat fungsi agama tersebut dapat terlihat bahwa agama memiliki peran yang mendasar dalam kehidupan individu dan masyarakat, yang termasuk dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Peran inilah yang terlihat dengan jelas pada masyarakat Indonesia. Dalam hal keadilan, fungsi agama sebagai pengawasan sosial sangat terlihat terutama dalam hal *reward dan punishment*.

Peran agama juga diperlukan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka gotong royong membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Agama berperan untuk memberikan edukasi kepada umatnya untuk ikut serta menyukseskan program pemerintah, bukan dengan melakukan demo. Diakonia transformatiflah yang menjembatani hal ini, karena melibatkan multi dimensional dan multi sektoral. Contoh diakonia transformatif terkait dengan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan adalah dengan memberikan khobah-khotbah yang mendorong jemaat/umat untuk turut serta dalam menyukseskan pembangunan dengan tidak menghalang-halangi pekerjaan proyek, dan mendorong jemaat untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata dan merata bagi kehidupan masyakarat sekitarnya.

Sebagai contoh, misalnya ada rencana pemerintah untuk membangun waduk yang bertujuan sebagai sistem pengaturan air bagi pertanian, maka peran agama adalah dengan memberikah khotbah, pendekatan pastoral ke jemaat untuk mendukung program tersebut karena pada akhirnya jika waduk itu jadi, maka dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dalam sektor pengairan hingga hasilnya dirasakan oleh lingkungan tersebut. Dan jika ada anggota jemaat ataupun umat yang ikut dalam pengerjaan waduk tersebut (baik di pemerintahan atau tempat bekerja) maka didorong untuk menyukseskan program tersebut. Jadi peran agama di sini adalah bersifat mengintegrasikan setiap kebutuhan dan keinginan lapisan masyarakat, dan memberikan bimbingan/penyuluhan kepada jemaat umat sehingga seluruh jemaat/umat dapat merasakan hasilnya yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, kultural dan agama.

Akan berbeda hasilnya jika peran agama dari sisi negatif yaitu mendisintegrasikan, memecah atau malah mengajak demo masyrakat oleh karena kurangnya informasi yang didapat, sehingga program pemerintah tidak berjalan di daerah tersebut. Akibatnya masyarakat di daerah tersebut akan mengalami kerugian, baik material maupun manfaat.

Kesimpulan

Peranan keadilan dan agama dalam masyarakat sosial harus berani untuk menempatkan diri sebagai pemeran yang lebih memilih kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Keadilan dan agama merupakan sebuah keterkaitan dalam membangun dan membentuk nilai moral bangsa agar kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara dapat terjadi dengan harmonis. Oleh sebab itu, peran sistem keadilan dan agama dalam masyarakat Indonesia harus mengedepankan landasan undang-undang dasar sebagai tonggak kesejahteraan sosial tercipta dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Peranan agama bukan saja berperan untuk kepentingan kegiatan dan aktifitas dalam agama saja, melainkan juga diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional. Meningkatkan kesadaran dan moralitas akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara merupakan tugas agama dalam membina serta membimbing umatnya, sehingga muncul keseimbangan antara nilai moral kepada Tuhan dan juga kasih terhadap sesama.

Daftar Pustaka

"Adil - Studi Kata - Alkitab SABDA," n.d.

"BAB III KONSEP KEADILAN DALAM BUDDHA - PDF Free Download." Accessed October 24, 2022. https://docplayer.info/72511044-Bab-iii-konsep-keadilan-dalam-buddha.html.

Dach, Otoritet, Delipiter Lase, Gustav Gabrieil Harefa, Fotani Ziliwu, and Yunelis Ndraha. *Pergumulan Di Sekitar Gereja Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.

"Demo 21 April Hari Ini Di DPR, Berikut Tuntutan Mahasiswa Dan Buruh Halaman All - Kompas.Com." Accessed October 21, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/09140231/demo-21-april-hari-ini-di-dpr-berikut-tuntutan-mahasiswa-dan-buruh?page=all.

Dengan Mewujudkan, Kemiskinan, Kesejahteraan Umum, and Yohanes Suhardin'. "Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 3 (September 3, 2012): 302–17. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/274.

Dery, Tamyiez. "Tamyiez Dery, Adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UNISBA 337," n.d., 337–51.

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life*. Edited by Edi AH Iyubenu and Arif Fahrudin. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

"Parisada Hindu Dharma Indonesia." Accessed October 24, 2022. https://phdi.or.id/artikel.php?id=keadilan.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderak Kementrian PUPR. "Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021." Kementrian PUPR Indonesia, 2021. https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021_Final.pdf.

Scharf, Betty R. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Siregar, Christian. "View of Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia," 2014. https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/2988/2379.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Solihin, Wildan, Ade Irvi, Nurul Husna, Nurul Fauziah, Saepul Mukti, Stai Kh, and E Z Muttaqien. "Peran Ajaran Islam Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi A . Pendahuluan Korupsi Merupakan Penyakit Sosial Yang Kerap Terjadi Dan Seringkali Menjadi Awal Runtuhnya Peradaban Yang Maju 1 Bahkan Dunia Pendidikan Pun Tidak Luput Dari Kejahatan Yang Luar Bi" 2, no. 2 (2021): 143–54.

Theodore, Goei, and Hendy Soegiharto. "Peran Agama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pendahuluan" 4, no. 2 (2022): 267–80.

Wahid, Nur Hidayat. *Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007.

Wibisono, M.Yusuf. *Sosiologi Agama*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Widyatmadja, J.P. *Yesus Dan Wong Cilik : Praksis Diakonia Transformatif Dan Teologi Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Yewangoe, A A. *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.